

ARTIKEL

**KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) : MENG-COUNTER
STABILISASI DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3
KILOGRAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM**

Oleh:

**JODI PRATAMA PUTRA
NPM. 1903012023**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) : MENG-COUNTER
STABILISASI DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3
KILOGRAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

JODI PRATAMA PUTRA
NPM. 1903012023

Pembimbing: Zumaroh, M.E.Sy

Program Studi S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: ftik.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Sidang Munaqosyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh saudara:

Nama : Jodi Pratama Putra
NPM : 1903012023
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (Het) : Meng-Counter Stabilisasi Distribusi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kilogram Perspektif Bisnis Islam

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel dibawah ini

Judul Artikel : Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) : Meng-Counter
Stabilitas Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3
Kilogram
Nama : Jodi Pratama Putra
NPM : 1903012023
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

DISETUJUI

Untuk diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

PENGESAHAN ARTIKEL

Nomor: B-1487/ln-28.3/D/Pr.00.9/07/2025

Artikel dengan Judul KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) : MENG-COUNTER STABILISASI DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM, disusun oleh JODI PRATAMA PUTRA, NPM. 1903012023, Program Studi: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Rabu, 25 Juni 2025.

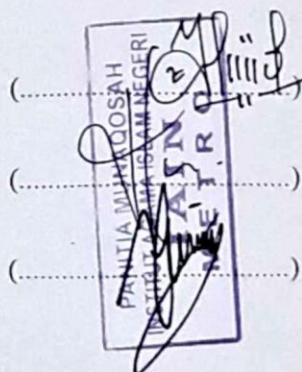
TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom

(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) : MENG-COUNTER STABILISASI DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM

Oleh :

JODI PRATAMA PUTRA

NPM. 1903012023

Penelitian ini menganalisis dampak ekonomi dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap distributor LPG di Pangkalan LPG Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa kebijakan HET bertujuan menjaga keadilan harga bagi konsumen (sebenarnya), namun penerapannya di lapangan menghadapi kendala seperti fluktuasi biaya operasional dan keterbatasan pasokan, yang menyebabkan distributor di daerah terpencil menjual di atas HET untuk menutupi biaya tambahan (kenyataannya). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai efektivitas kebijakan HET serta manfaat dan tantangan yang dihadapi distributor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan HET terhadap distribusi LPG, khususnya dalam aspek ekonomi dan keseimbangan antara kepentingan konsumen serta keberlanjutan bisnis distributor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan HET memberikan stabilitas harga bagi konsumen, distributor mengalami kesulitan dalam menjaga pasokan dan menghadapi kenaikan biaya operasional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan operasional dan pengawasan ketat agar kebijakan ini tetap berjalan efektif, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan distributor dan kepentingan konsumen.

Kata kunci: Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi LPG, kebijakan harga, dampak ekonomi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jodi Pratama Putra
NPM : 1903012023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juni 2025

Yang menyatakan


Jodi Pratama Putra
NPM. 1903012023

MOTTO

“ semua orang memiliki masanya masing-masing. Tak perlu terburu-buru, tungguilah. Kesempatan itu akan datang dengan sendirinya”

-Gol D Roger (One Piece)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepala Allah SWT, berkat rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini. Jurnal ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk orang tua tercinta, Ayahanda Robi Suganda dan pintu surgaku Ibunda Astri Yeni. Terimakasih atas semua pengorbanan, kerja keras, kasih sayang, dan kehidupan yang selalu kalian usahakan untuk masa depan, serta doa yang tidak pernah putus untuk anakmu ini. Sekali lagi terimakasih atas dukungannya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Untuk Istriku tersayang Siska Sri Rezeki yang selalu setia mendampingi dalam suka dan duka. Terima kasih atas doa, dukungan, dan pengertianmu selama ini. Kau adalah penyemangat utama dalam setiap langkahku
3. Dosen pembimbing Ibu Zumaroh, M.E.Sy yang telah memberikan motivasi, arahan, ilmu, serta dukungan dalam proses pengerjaan jurnal penulis.
4. Sahabat dan teman seperjuangan di Ekonomi Syari'ah angkatan 2019 Institut Agama Islam Negei (IAIN) yang telah ikut serta memotivasi dalam menyelesaikan jurnal ini.
5. Terakhir, Almamaterku tercinta Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negei (IAIN).

KATA PENGANTAR

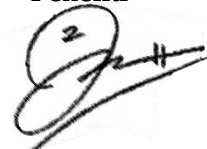
Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penulisan Jurnal ini. Penyusunan Jurnal ini telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negei (IAIN) Metro
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E, selaku ketua jurusan S1 Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negei (IAIN) Metro.
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan nasihat kepada peneliti.
5. Almamaterku, Institut Agama Islam Negei (IAIN) Metro.
6. Responden, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis mendapatkan data penelitian dengan mudah.

Peneliti menyadari bahwa penulisan jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Dan akhirnya semoga jurnal ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Metro, 2 juni 2025

Peneliti



Jodi pratama putra

NPM. 1903012023

Highest Retail Price (HET) Policy: Countering the Stabilisation of 3 Kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) Distribution an Islamic Business Perspective

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) : Meng-Counter Stabilisasi Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Perspektif Bisnis Islam

Jodi Pratama Putra¹

Zumaroh²

Rina El Maza³

¹Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

² Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

³ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

¹Email: jodiputra9988@gmail.com

²Email: zumaroh@metrouniv.ac.id

³Email: rinaelmaza828@gmail.com

Abstract:

This study analyzes the economic impact of the implementation of the Highest Retail Price (HET) policy on LPG distributors at the Sumbergede LPG Base, Sekampung, East Lampung. The issue at hand is that while the HET policy aims to ensure fair pricing for consumers (ideally), its implementation in the field faces challenges such as fluctuating operational costs and supply limitations, forcing distributors in remote areas to sell above HET to cover additional expenses (in reality). Based on this issue, the study formulates the problem regarding the effectiveness of the HET policy, as well as the benefits and challenges faced by distributors. This research aims to evaluate the implementation of the HET policy on LPG distribution, particularly in terms of its economic impact and the balance between consumer interests and distributor business sustainability. A qualitative descriptive approach is employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that while the HET policy provides price stability for consumers, distributors face difficulties in maintaining supply and dealing with rising operational costs. Therefore, operational support and strict supervision are needed to ensure the effectiveness of this policy while considering both distributor welfare and consumer interests.

Keywords: Highest Retail Price (HET), LPG distributors, pricing policy, economic impact.

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis dampak ekonomi dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap distributor LPG di Pangkalan LPG Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa kebijakan HET bertujuan menjaga keadilan harga bagi konsumen (sebenarnya), namun penerapannya di lapangan menghadapi kendala seperti fluktuasi biaya operasional dan keterbatasan pasokan, yang menyebabkan distributor di daerah terpencil menjual di atas HET untuk menutupi biaya tambahan (kenyataannya). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai efektivitas kebijakan HET serta manfaat dan tantangan yang dihadapi distributor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan HET terhadap distribusi LPG, khususnya dalam aspek ekonomi dan keseimbangan antara kepentingan konsumen serta keberlanjutan bisnis distributor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan HET memberikan stabilitas harga bagi konsumen, distributor mengalami kesulitan dalam menjaga pasokan dan menghadapi kenaikan biaya operasional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan operasional dan pengawasan ketat agar kebijakan ini tetap berjalan efektif, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan distributor dan kepentingan konsumen.

Kata kunci: Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi LPG, kebijakan harga, dampak ekonomi.

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung mengatur kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/195/B.IV/HK/2015, yang menetapkan HET LPG 3 kg dalam radius 60 km dari depot Pertamina atau Stasiun Pengisian Pengangkut Bulk Elpiji (SPPBE). Kebijakan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menjaga kestabilan harga di tingkat sub-penyalar. Penetapan ini merupakan langkah pemerintah untuk mengendalikan harga jual barang dan mencegah penjualan di atas harga resmi¹. Penetapan harga ini dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan harga jual barang dagangan dan melarang penjualan di atas harga yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Islam, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya harga yang adil dan terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang sehat, asalkan tidak ada ketimpangan atau ketidakadilan. Prinsip keadilan harga menjadi sangat penting dalam transaksi Islami, untuk menghindari tindakan zalim². Dalam hal ini, pemilik pangkalan LPG sebagai pelaku usaha berkewajiban mematuhi harga yang ditetapkan demi menghindari praktik curang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib menjalankan aktivitas dengan itikad baik³. Dalam praktiknya, kebijakan HET kadang menimbulkan dampak negatif terhadap rantai distribusi LPG, khususnya di daerah rural. Banyak pangkalan terpaksa menjual di atas HET untuk menutupi biaya operasional, seperti transportasi dan logistik, sehingga muncul dilema antara mematuhi regulasi dan menjaga kelangsungan bisnis. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi distributor yang di satu sisi diharapkan mematuhi kebijakan harga pemerintah, namun di sisi lain harus menjaga kelangsungan bisnis di tengah biaya operasional yang terus meningkat⁴.

Peran Pemerintah Daerah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan HET sangat penting agar harga LPG tetap terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah menetapkan HET di tingkat sub-penyalar untuk menjaga keseimbangan harga di semua lapisan masyarakat. Penetapan ini dilakukan melalui regulasi yang memberikan kewenangan pada daerah untuk menyesuaikan HET dengan kondisi lokal masing-masing. Tujuannya adalah mengendalikan kenaikan harga LPG yang dipicu oleh variasi biaya distribusi dan operasional di tiap wilayah⁵. Dengan penetapan harga ini, pemerintah daerah berusaha menekan kenaikan harga LPG yang disebabkan oleh biaya operasional dan distribusi yang bervariasi di setiap lokasi.

Dalam ekonomi Islam, penetapan harga oleh pemerintah dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan di pasar. Islam membolehkan intervensi harga oleh otoritas dalam situasi tertentu, terutama jika harga pasar tidak wajar dan merugikan masyarakat. Namun, bila intervensi harga tidak disertai dengan subsidi atau dukungan bagi pelaku usaha kecil seperti pangkalan LPG, maka kebijakan tersebut justru bisa menekan daya saing dan kesejahteraan distributor. Dalam pasar yang ideal, pedagang seharusnya menyesuaikan

¹ Surat Keputusan Gubernur Lampung, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg," September 30, 2019.

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 80.

³ Reza Faizal Idris, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 228.

⁴ Wawan Gunawan, "Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG Tabung 3 Kg Di Kabupaten Tabalong," *JAPB* 3, no. 2 (2020): 709.

⁵ Rusdaya Basri, "Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 KG Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 131.

harga dengan kondisi aktual, tidak menaikkan harga saat pasar terganggu. Manipulasi harga bisa merugikan konsumen, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti LPG⁶. Namun, jika kebijakan penetapan harga tidak diimbangi dengan subsidi atau dukungan operasional yang memadai bagi pelaku usaha kecil seperti pangkalan LPG, dampak negatifnya bisa melemahkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi distributor⁷. Dalam mekanisme pasar, pedagang harus menawarkan harga yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Pedagang diharapkan tidak menaikkan harga ketika pasar tidak stabil, karena hal ini dapat menimbulkan distorsi pasar dan melemahkan daya beli konsumen atas barang yang mereka butuhkan. Manipulasi harga oleh pedagang juga dapat merugikan pembeli, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok⁸.

Secara teori, HET merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam pasar guna menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat, terutama untuk barang bersubsidi dan strategis. Dalam pandangan ekonomi Islam, intervensi harga oleh otoritas dibenarkan ketika terjadi kegagalan pasar akibat monopoli, kelangkaan, atau spekulasi. Harga yang adil adalah bagian dari prinsip keadilan ekonomi yang mencegah penindasan dalam transaksi. Stabilitas distribusi menjadi kunci keberhasilan HET, yang membutuhkan keseimbangan antara harga, logistik, dan infrastruktur. Tanpa dukungan pada aspek operasional distributor, kebijakan ini justru berpotensi menciptakan ketimpangan dalam rantai distribusi, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki kendala geografis dan biaya tinggi⁹. Konsep stabilitas distribusi juga menjadi bagian integral dari efektivitas HET. Distribusi yang stabil memerlukan sinergi antara kebijakan harga, biaya logistik, serta dukungan infrastruktur. Tanpa pertimbangan yang memadai antara HET dan beban operasional distributor, kebijakan tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan baru di rantai pasok. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan HET berdampak terhadap pelaku distribusi, terutama di wilayah pedesaan dengan kondisi geografis menantang.

Penelitian ini dikomparasi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian pertama oleh Ta'sir Al-Jabari menyoroti kepatuhan pemilik pangkalan terhadap HET dan tindakan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran¹⁰. Persamaannya dengan penelitian ini adalah analisis realisasi HET, tetapi fokus penelitian ini lebih pada dampak ekonomi terhadap distributor.

Di sisi lain, pemilik Pangkalan LPG Sumbergede melaporkan bahwa penetapan HET berpengaruh signifikan terhadap keuntungan mereka. Meskipun ada penurunan harga yang dapat menarik lebih banyak pelanggan, mereka tidak dapat menaikkan harga untuk menutupi peningkatan biaya operasional dan pengiriman. Penelitian kedua oleh Wildanum Mukhalladu membahas pengawasan distribusi LPG di Aceh Timur. Persamaannya terletak pada analisis HET, sementara perbedaannya adalah fokus penelitian ini lebih pada efek langsung kebijakan terhadap operasional pangkalan dan bukan hanya pada pengawasan

⁶ Yasin Soumena, "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah," *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 46.

⁷ Nuraisah Ahmad, "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Dalam Pandangan Fuqaha'," *Mau'izhah* 9, no. 1 (2019): 167.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 127.

⁹ Staydi F. Najoran, "Analysis Strategi Pemasaran Pangkalan Gas LPG 3 KG Pertamina Vera Lumintang Di Desa Poopo Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal EMBA* 11, no. 4 (2023): 626–27.

¹⁰ Desna, "analisis kepatuhan pemilik pangkalan lpg terhadap het yang ditetapkan pemerintah dalam penjualan gas subsidi berdasarkan perspektif ta'sir al-jabari", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

distribusi¹¹.

Kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen menjadi masalah utama bagi pemilik pangkalan setelah HET diterapkan. Permintaan yang meningkat seringkali tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup, terutama ketika pengiriman dari distributor mengalami keterlambatan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan dapat mengancam reputasi pangkalan¹². Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru, pemilik pangkalan harus merancang strategi bisnis yang lebih efisien. Mereka berusaha mengelola stok dengan lebih baik dan mencari cara untuk menekan biaya operasional. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dilakukan agar mereka tetap loyal meskipun margin keuntungan semakin kecil¹³.

Penelitian ketiga oleh Astriani Saputri meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual LPG di atas HET di Sinjai Selatan. Fokusnya pada perspektif ekonomi Islam menjadi pembeda utama, sementara penelitian ini lebih mengkaji dampak praktis dan ekonomi bagi pangkalan di Lampung Timur¹⁴. Kebijakan HET dilihat oleh pemilik pangkalan sebagai hal yang baik untuk konsumen, tetapi mereka juga merasakan dampak negatif bagi usaha kecil mereka. Tantangan ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pemilik pangkalan, yang berharap pemerintah dapat memberikan dukungan atau insentif untuk membantu mereka beroperasi secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, penetapan HET sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa faktor, seperti distribusi jarak yang jauh, biaya operasional yang tidak stabil, dan keterbatasan pasokan, menyebabkan distributor harus berupaya menyesuaikan harga atau mencari strategi lain untuk tetap memperoleh keuntungan yang memadai. Faktor geografis yang jauh dari pusat distribusi utama turut mempengaruhi biaya distribusi dan angkutan, sehingga pangkalan LPG di daerah terpencil sering kali berada dalam posisi sulit untuk mematuhi HET tanpa mengalami kerugian finansial¹⁵. Secara lebih luas, kebijakan HET yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga di masyarakat kadang kala berdampak sebaliknya pada rantai distribusi LPG. Beberapa pangkalan LPG, terutama di daerah rural, sering kali terpaksa menjual di atas HET untuk menutupi biaya tambahan yang tidak terhindarkan, seperti biaya transportasi dan logistik. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi distributor yang di satu sisi diharapkan mematuhi kebijakan harga pemerintah, namun di sisi lain harus menjaga kelangsungan bisnis di tengah biaya operasional yang terus meningkat¹⁶.

Implementasi HET dalam pasar LPG di Indonesia juga berupaya menjaga ketahanan energi nasional serta mendorong masyarakat beralih dari minyak tanah ke LPG sebagai sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pangkalan LPG sering kali menghadapi kendala dalam mematuhi HET akibat fluktuasi harga operasional yang tidak diimbangi oleh kebijakan penunjang,

¹¹ Mukhalladun, widanum, " Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji Subsidi 3 Kg Di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

¹² Evra Willy, "Ketentuan Hukum Islam Tentang Ta'sir Al-Jabari," *Jurnal Ilmiah Syariah* 11, no. 2 (2013): 32.

¹³ Hajar, "Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan," *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 291–93.

¹⁴ Saputri, Astriani, "Analisis Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan", IAI Muhammadiyah Sinjai, 2019.

¹⁵ Nazaruddin A. Wahid, *Paradigma Ekonomi Islam* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2013), 147.

¹⁶ Vita Puji Lestari, "Permasalahan Dan Tantangan Transformasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kilogram," *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI* 1, no. 1 (2022): 3.

seperti subsidi biaya angkutan atau harga dasar yang lebih fleksibel¹⁷. Akibatnya, beberapa distributor memilih langkah ilegal, seperti menaikkan harga di atas HET atau mengurangi kuota pasokan untuk menghindari kerugian.

Sebagai tambahan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan HET agar berjalan dengan baik di lapangan. Di daerah Lampung Timur, seperti di Sekampung, pemerintah daerah telah menetapkan harga eceran tertinggi yang diperbolehkan bagi LPG 3 kg. Akan tetapi, keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia dalam pengawasan distribusi LPG masih menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan yang optimal. Kesulitan ini membuka peluang bagi distributor yang ingin mengambil keuntungan dengan menjual di atas HET tanpa takut terdeteksi¹⁸.

Studi ini berfokus pada pangkalan LPG di Desa Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur, yang menjadi sampel relevan untuk menganalisis dampak ekonomi kebijakan HET di tingkat distribusi. Dengan mempelajari bagaimana pangkalan LPG di Sumbergede mengelola kebijakan HET, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan HET serta hambatan yang dihadapi oleh distributor dalam memenuhi ketentuan harga pemerintah.

Fokus pada pangkalan LPG di pedesaan juga penting untuk melihat bagaimana faktor geografis dan ekonomi lokal memengaruhi penerapan kebijakan HET. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) : Meng-Counter Stabilisasi Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram, Perspektif Islam”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, tindakan, dan perilaku. Penelitian ini bersifat studi kasus karena menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya¹⁹. Penelitian kualitatif melibatkan prosedur yang menghasilkan data studi kasus dalam bentuk kalimat dari orang-orang yang diamati atau diteliti. Penelitian ini bersifat studi kasus, atau sering disebut kualitatif, di mana pendekatan studi kasus digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian sebagaimana adanya²⁰ mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan tujuan untuk memaparkan fakta secara rinci dan sistematis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan pemilik pangkalan LPG 3 kg di Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan kebijakan HET dan teori ekonomi Islam seperti Ta'sir Al-Jabari.

Penelitian ini bersifat studi kasus, atau sering disebut kualitatif, di mana pendekatan studi kasus digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan

¹⁷ Pradima Putri Prameswar, “Efisiensi Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas Lpg Pada Masyarakat Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat,” *IPDN Kemendagri* 2, no. 3 (2022): 3.

¹⁸ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 84.

¹⁹ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 5.

²⁰ Masyuri, dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 25.

objek penelitian sebagaimana adanya²¹, seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek secara faktual dan terstruktur²². Data penelitian terdiri dari sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan pemilik pangkalan LPG 3 kg di Sekampung, Lampung Timur, serta sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan situs web yang mendukung konsep HET pemerintah dan ta'sir al-jabari²³. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk memastikan validitas informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi teknik (dengan mengombinasikan observasi, wawancara, dan dokumentasi) serta triangulasi waktu untuk memverifikasi konsistensi data secara berkala²⁴.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan²⁵. Teknik ini bertujuan untuk mengorganisir data, mencari pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu untuk pengecekan data secara berkala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Desa Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur, dengan fokus pada pangkalan Rafiudin yang menjual LPG seharga Rp20.000/tabung, memperoleh pasokan tiga kali dalam seminggu (Senin, Rabu, dan Jumat), sebanyak 100 tabung setiap pengiriman. HET yang dimaksud adalah batas harga jual tertinggi LPG 3 kg yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/816/V.25/HK/2024, HET terbaru ini disosialisasikan dalam Operasi Pasar LPG yang digelar di berbagai lokasi, termasuk pangkalan dan agen resmi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa LPG bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga yang wajar dan sesuai aturan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori regulasi harga maksimum (price ceiling) dalam ekonomi pasar serta prinsip keadilan dalam bisnis Islam. Teori price ceiling digunakan untuk memahami bagaimana intervensi pemerintah melalui kebijakan harga mempengaruhi keseimbangan pasar dan distribusi barang, sedangkan dari perspektif Islam, penetapan HET dikaji berdasarkan nilai-nilai keadilan ('adl), kebermanfaatan (maslahah), dan larangan eksploitasi ('gharar' dan 'ikhtikar'). Dalam praktiknya, kebijakan

²¹ Masyuri, dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 25.

²² P. Joko Subagiyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori Dan Prektek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39.

²³ Dimas Setiawan, *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2000), 78.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 72.

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* ({PT} Rajagrafindo Persada, n.d.), 72.

HET bertujuan untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi, namun dapat berdampak pada pelaku usaha seperti pangkalan yang menghadapi tantangan dalam menjaga margin keuntungan karena biaya distribusi dan operasional sering kali tidak diimbangi dengan fleksibilitas harga.

Narasi harga LPG di lapangan menunjukkan bahwa meskipun HET ditetapkan pada angka tertentu, masih terdapat ketidaksesuaian harga di warung pengecer yang menjual di atas HET. Konsumen menyampaikan keberatan atas hal ini, merasa bahwa meskipun harga tetap Rp20.000 di pangkalan seperti milik Rafiudin, namun harga bisa naik menjadi Rp23.000–Rp25.000 di warung terdekat. Mereka menilai bahwa ketidaksesuaian ini merugikan mereka dan menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dari pemerintah. Sebaliknya, pangkalan mengaku sulit menjaga harga tetap sesuai HET karena mereka tidak mendapat subsidi transportasi, sementara biaya pengangkutan terus meningkat. Keuntungan pangkalan umumnya hanya berasal dari margin kecil, namun tetap mendapat manfaat dari tingginya permintaan LPG, terutama di wilayah padat penduduk.

Dalam hal distribusi, pengiriman dilakukan secara teratur tiga kali seminggu oleh pihak distributor, namun sering kali mengalami hambatan seperti keterlambatan pengiriman atau jumlah pasokan yang tidak sesuai. Ini berdampak pada stok di pangkalan dan berpengaruh langsung pada konsumen. Meskipun nama pangkalan dan harga HET telah dicantumkan di lokasi, ketidaksesuaian antara jumlah permintaan dan pasokan sering kali menyebabkan kelangkaan sesaat yang membuka celah bagi praktik spekulasi harga di tingkat pengecer. Dampak positif dari penerapan HET adalah kestabilan harga di tingkat pangkalan, yang memberikan rasa aman bagi konsumen. Namun, dampak negatifnya adalah tekanan ekonomi bagi pemilik pangkalan, terutama ketika biaya distribusi tidak ditanggung dan fleksibilitas harga tidak tersedia.

Masing-masing variabel—harga, distribusi, keuntungan, dan reaksi konsumen—dikolaborasikan untuk menganalisis kesesuaian antara realitas di lapangan dengan prinsip bisnis Islam. Jika dilihat dari sisi konsumen, kebijakan HET sudah sesuai dengan prinsip keadilan Islam karena mencegah eksploitasi harga dan menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Namun, dari sisi pelaku usaha seperti pangkalan, kebijakan ini belum sepenuhnya adil karena tidak mempertimbangkan aspek keadilan distributif, seperti subsidi ongkos kirim atau biaya logistik. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan HET perlu disertai dengan dukungan struktural seperti bantuan transportasi atau insentif operasional agar implementasinya benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Jika tidak ada intervensi tersebut, maka pelaku usaha kecil berada dalam posisi yang dirugikan, yang pada akhirnya juga bisa berdampak negatif terhadap keberlanjutan pasokan LPG bersubsidi.

Dari perspektif bisnis Islam, kebijakan HET sudah sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang melarang praktik harga yang menekan pihak lemah. Namun, kebijakan ini kurang memperhatikan aspek keadilan bagi pelaku usaha kecil seperti pangkalan yang harus menanggung beban biaya operasional tanpa dukungan subsidi atau fleksibilitas harga. Jika tidak ada penyesuaian, maka keadilan dalam konteks bisnis Islam belum tercapai sepenuhnya. Jika sudah sesuai, maka hal ini tercermin dari perlindungan konsumen yang menjadi bagian dari prinsip masalah dalam maqashid syariah. Oleh sebab itu, dalam konteks distribusi LPG, pemerintah perlu memberikan perhatian serius kepada para pelaku usaha agar mereka mampu bertahan dan memberikan pelayanan maksimal tanpa terbebani oleh sistem yang tidak proporsional.

Masalah keterlambatan pasokan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan infrastruktur di wilayah Sekampung, Lampung Timur. Jalan yang sempit, rusak, dan sulit diakses membuat pengiriman dari distributor menjadi tidak efisien. Dalam kondisi tertentu,

pengiriman harus tertunda karena cuaca buruk atau kerusakan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan distribusi LPG bukan hanya soal jumlah pasokan, melainkan juga bagaimana barang tersebut dapat sampai ke konsumen tepat waktu dan merata. Jika infrastruktur tidak diperbaiki, ketimpangan akses LPG antar wilayah akan terus terjadi.

Ketika pasokan terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan konsumen tetapi juga pemilik pangkalan yang menjadi pihak pertama menerima keluhan. Mereka tidak memiliki kontrol atas kecepatan pengiriman dari distributor sehingga menghadapi tekanan psikologis dan risiko kestabilan usaha. Beberapa konsumen kecewa dan berpindah ke pangkalan lain atau membeli dengan harga lebih tinggi, yang merugikan pangkalan yang berusaha jujur sesuai kebijakan pemerintah. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) bertujuan melindungi daya beli masyarakat, namun tidak cukup tanpa sistem distribusi yang efisien. HET hanya optimal jika ketersediaan barang terjamin. Jika pasokan tidak stabil, kebijakan harga murah menjadi sia-sia karena barang sulit diperoleh. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang komprehensif—tidak hanya mengatur harga, tetapi juga memperkuat distribusi melalui penguatan logistik dan infrastruktur, khususnya di daerah dengan akses terbatas.

Dari sudut pandang interaksi sosial, penerapan HET memengaruhi dinamika hubungan konsumen dan pemilik pangkalan. Konsumen merasa harga resmi memberi perlindungan dan rasa aman, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun, pemilik pangkalan berada pada posisi sulit, harus menyeimbangkan layanan maksimal dengan keuntungan yang tipis akibat biaya operasional yang terus naik. Dalam kondisi ini, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, distributor, dan pemilik pangkalan sangat penting. Pemerintah harus mendengar aspirasi pelaku usaha di lapangan agar kebijakan sesuai realitas, bukan hanya angka di atas kertas. Pemilik pangkalan juga berharap dukungan nyata dari pemerintah daerah, seperti insentif, subsidi biaya pengangkutan, bantuan peralatan, atau pelatihan manajemen usaha, agar mereka lebih bersemangat menjalankan usaha dan menjaga kualitas pelayanan.

Situasi di Pangkalan LPG Sumbergede mencerminkan kondisi yang mungkin dialami pangkalan lain di daerah dengan akses terbatas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan inklusif yang memperhatikan aspek harga, distribusi, infrastruktur, dan keberlangsungan usaha pelaku distribusi di tingkat bawah. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat meminimalkan ketimpangan distribusi dan kekecewaan konsumen.

Jika kebijakan hanya fokus stabilisasi harga tanpa memperhatikan ekosistem distribusi, masalah keterlambatan pasokan dan ketidakpuasan konsumen akan terus berulang, berpotensi melemahkan sistem distribusi LPG secara keseluruhan. Intervensi strategis yang proaktif dibutuhkan, khususnya untuk memperkuat jaringan distribusi di wilayah termarginalkan. Penerapan HET memberikan dampak signifikan di Pangkalan LPG Sumbergede. Di satu sisi, kebijakan ini membantu konsumen mendapatkan harga stabil dan terjangkau, terutama di tengah ekonomi yang fluktuatif. Namun, di sisi lain, pemilik pangkalan menghadapi tekanan biaya operasional yang meningkat, sementara harga jual LPG tidak dapat disesuaikan, sehingga margin keuntungan menipis dan berisiko pada kelangsungan usaha.

Dinamika hubungan pemilik pangkalan dan konsumen berubah sejak HET diberlakukan. Konsumen merasa lebih dekat secara emosional dengan pangkalan karena kebijakan pemerintah yang berpihak. Namun, pemilik pangkalan harus menyeimbangkan tuntutan harga terjangkau dengan biaya operasional yang terus meningkat, menimbulkan posisi serba salah. Pemilik pangkalan menyesuaikan strategi layanan demi menjaga kepuasan pelanggan di tengah tekanan biaya logistik, bahan bakar, dan upah tenaga kerja. Beban ganda ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab sosial yang dipikul pelaku usaha pangkalan di komunitasnya.

Keluhan utama konsumen adalah ketersediaan stok LPG, terutama saat permintaan meningkat pada awal bulan atau hari besar keagamaan. Kekosongan stok memaksa konsumen mencari alternatif dengan harga di atas HET, menurunkan kepuasan dan mengganggu stabilitas pasar lokal. Penyebab ketimpangan pasokan seringkali karena keterlambatan distribusi akibat cuaca, kondisi jalan, atau jadwal pengiriman yang tidak sesuai. Keberhasilan HET sangat bergantung pada kesiapan sistem distribusi menyeluruh. Tanpa distribusi efisien, beban pelayanan dan tekanan pasar ditanggung pangkalan secara penuh.

Ketimpangan beban dan kewenangan pada pemilik pangkalan menjadi titik krusial. Mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan konsumen, namun tidak punya kontrol penuh atas pasokan. Saat stok kosong, mereka tetap menghadapi keluhan dan risiko reputasi, meski bukan penyebab utama masalah. Relasi sosial antara pemilik pangkalan dan konsumen juga semakin kompleks. Konsumen menganggap pangkalan sebagai perwakilan pemerintah sehingga menuntut pelayanan maksimal. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi akibat kendala pasokan, kekecewaan dilampiaskan ke pangkalan, menimbulkan tekanan psikologis.

Interaksi ini bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan hubungan sosial kompleks di mana pemilik pangkalan harus menjaga citra dan kepercayaan masyarakat meski dalam tekanan usaha. Sering kali mereka mengorbankan keuntungan demi loyalitas pelanggan dan keharmonisan sosial. Ketergantungan konsumen pada LPG sebagai kebutuhan pokok dan untuk usaha kecil memperbesar tekanan terhadap pangkalan. Gangguan pasokan berpengaruh langsung pada aktivitas ekonomi lokal, sehingga pangkalan menjadi bagian penting rantai ekonomi yang harus mendapat perhatian serius pemerintah.

Permasalahan ini menyoroti kebutuhan kebijakan pendukung selain HET, misalnya subsidi transportasi, pelatihan manajemen stok, atau insentif bagi pangkalan yang mampu menjaga ketersediaan dan pelayanan. Tanpa kebijakan pelengkap, HET menjadi beban sepihak yang dapat menurunkan motivasi pelaku usaha. Sistem distribusi dan kebijakan harga LPG sebaiknya dirancang terintegrasi, melibatkan semua pihak dalam evaluasi dan pengambilan keputusan. Pelaku usaha di tingkat bawah harus dilibatkan agar kebijakan menyentuh masalah teknis di lapangan, menghindari kebijakan top-down yang kurang efektif.

Wawancara dengan konsumen menunjukkan kepuasan pada harga sesuai HET, namun mereka mengeluhkan ketidakpastian pasokan terutama saat permintaan tinggi. Mereka berharap pangkalan lebih tanggap terhadap kekosongan stok. Hal ini menandakan kepuasan konsumen bergantung pada ketersediaan barang dan kualitas layanan, bukan hanya harga. Pemilik pangkalan mengungkapkan kesulitan menyesuaikan harga dengan biaya distribusi yang bervariasi dan jarak pengiriman jauh. Beberapa harus menalangi biaya logistik dari kantong pribadi agar harga tetap sesuai HET, bahkan membatasi jumlah tabung yang dijual agar kerugian tidak membesar.

Dari sisi pelayanan, pemilik pangkalan berupaya memberi layanan terbaik meski di bawah tekanan. Pelayanan ramah dan cepat kunci mempertahankan pelanggan, tetapi tingginya permintaan dan keterbatasan tenaga kerja kadang menurunkan kualitas layanan, terutama saat sibuk. Penerapan HET juga memengaruhi hubungan pemilik pangkalan dengan distributor. Distributor tidak selalu bisa memenuhi pasokan sesuai jadwal, sehingga pangkalan menghadapi kemarahan pelanggan tanpa kontrol penuh atas pasokan. Ketegangan ini dapat diatasi dengan koordinasi dan pengawasan yang lebih baik dari pemerintah daerah atau Pertamina.

Berdasarkan temuan penelitian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sangat bergantung pada pengelolaan distribusi yang efektif serta dukungan nyata dari pemerintah, seperti subsidi atau insentif tambahan. Tanpa adanya

dukungan tersebut, pemilik pangkalan LPG akan terus mengalami tekanan berat, yang berpotensi mengancam ketersediaan LPG di tingkat masyarakat. Pemerintah perlu menyadari bahwa pelaku usaha kecil, khususnya pemilik pangkalan, merupakan ujung tombak distribusi energi bersubsidi yang memiliki peran strategis dalam menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Kondisi geografis yang sulit, misalnya infrastruktur jalan yang rusak dan jarak yang jauh dari pusat distribusi LPG, menjadi tantangan utama bagi pemilik pangkalan, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Sumbergede. Situasi ini memaksa mereka menanggung biaya tambahan untuk pengangkutan tabung LPG dari agen atau distributor utama ke pangkalan. Padahal, harga jual kepada konsumen telah ditetapkan melalui kebijakan HET yang tidak mengakomodasi biaya operasional di lapangan. Akibatnya, margin keuntungan menjadi sangat tipis, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan kerugian, terutama ketika biaya logistik tidak sebanding dengan volume penjualan harian.

Tidak sedikit pemilik pangkalan yang terpaksa menggunakan kendaraan pribadi yang kurang memadai untuk mengangkut tabung LPG karena minimnya bantuan logistik maupun fasilitas kendaraan dari distributor. Risiko yang mereka tanggung bukan hanya dari aspek finansial, tetapi juga keselamatan kerja. Pengangkutan gas dengan kendaraan seadanya sangat rentan terhadap kecelakaan, menggambarkan minimnya perhatian terhadap keselamatan kerja dalam distribusi LPG tingkat lokal. Meski demikian, dedikasi tinggi dari para pemilik pangkalan dalam menjaga kelancaran pasokan LPG patut diapresiasi, namun tanpa dukungan konkret, beban ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental.

Ketidaksesuaian antara kondisi geografis dan sistem penetapan harga melalui HET juga menciptakan ketimpangan ekonomi antara pangkalan di wilayah strategis dan di daerah terpencil. Pangkalan yang berlokasi di pusat kota memiliki akses distribusi yang lebih mudah serta biaya angkut rendah, sehingga masih dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual. Sebaliknya, pangkalan di wilayah pelosok harus menanggung beban logistik yang tinggi tanpa adanya kelonggaran harga, yang berpotensi menurunkan minat masyarakat setempat menjadi pelaku usaha pangkalan LPG.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan HET di lapangan masih belum optimal. Di beberapa wilayah, pengawasan bersifat sporadis dan belum didukung oleh sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Pelanggaran harga HET kerap terjadi, terutama di tingkat pengecer yang menjual LPG jauh di atas harga resmi. Konsumen yang dirugikan sebenarnya memiliki niat melaporkan, namun seringkali tidak mengetahui mekanisme pelaporan atau merasa tidak ada tindak lanjut atas laporan mereka. Minimnya literasi masyarakat tentang hak konsumen dan cara menyuarakan pelanggaran membuka celah bagi praktik harga di luar ketentuan, sehingga distribusi LPG menjadi tidak sehat dan rawan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak konsumen dan mekanisme pelaporan pelanggaran menjadi langkah penting. Perlu dikembangkan sistem pengaduan terintegrasi berbasis teknologi, seperti aplikasi pengaduan resmi yang mudah diakses dan memungkinkan pelaporan secara anonim serta menyediakan nomor pelacakan laporan. Sistem ini akan membantu pemerintah memetakan titik-titik rawan pelanggaran dan memperbaiki distribusi secara lebih tepat sasaran. Namun, efektivitas sistem pengaduan ini sangat bergantung pada tindak lanjut nyata dari pihak berwenang. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemilik pangkalan sering menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka ingin mematuhi kebijakan dan menjaga harga sesuai HET, namun di sisi lain, tekanan dari distributor dan keterbatasan logistik memaksa mereka mengambil langkah pragmatis agar usaha tetap berjalan. Beberapa bahkan “terpaksa” menjual di atas HET demi menutupi biaya tambahan yang tidak tertutupi margin harga resmi. Hal ini lebih merupakan

bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi riil daripada niat melanggar aturan.

Persoalan lain adalah tidak semua pangkalan memiliki akses informasi maupun hubungan yang baik dengan distributor. Distributor cenderung memprioritaskan pangkalan besar atau yang berada di lokasi strategis, sementara pangkalan kecil di daerah terpencil menjadi prioritas terakhir dalam pengiriman. Akibatnya, kelangkaan LPG lebih sering terjadi di daerah seperti Sumbergede, sehingga konsumen terpaksa membeli dari pengecer dengan harga tinggi. Pengawasan aparat atau dinas terkait juga belum berjalan maksimal. Inspeksi pangkalan seringkali hanya dilakukan jika ada pengaduan masyarakat, sehingga pemantauan distribusi dan penerapan harga bersifat reaktif, bukan preventif. Kondisi ini menyulitkan deteksi dini penyimpangan dan pembenahan, bahkan dalam beberapa kasus laporan tidak ditindaklanjuti dengan sanksi tegas, melemahkan efek jera terhadap pelanggaran.

Keseluruhan permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa distribusi LPG dan pelaksanaan kebijakan HET tidak hanya soal harga, tetapi juga dipengaruhi faktor geografis, logistik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Jika salah satu elemen ini lemah, kebijakan yang semula bertujuan melindungi konsumen justru menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha kecil di tingkat pangkalan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan menyeluruh dan sinergi semua pihak terkait.

Dampak ekonomi pada pemilik pangkalan pasca penerapan HET cukup signifikan. Beberapa pelaku usaha melaporkan penurunan laba bersih hingga 30% per bulan dibandingkan sebelum kebijakan diberlakukan secara ketat. Walaupun volume penjualan meningkat akibat harga lebih terjangkau, keuntungan per tabung sangat kecil bahkan hampir tidak menutup biaya operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pro-rakyat ini belum mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi riil di tingkat pelaksana lapangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tunggal seperti Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu didukung oleh kebijakan pendukung lain agar pelaku usaha di tingkat bawah dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi transportasi, bantuan operasional, atau insentif khusus bagi pangkalan di wilayah terpencil yang terbukti konsisten menjalankan HET. Langkah ini penting untuk memperkuat posisi pangkalan sebagai mitra strategis dalam distribusi energi nasional.

Selain aspek ekonomi dan logistik, dimensi sosial kebijakan ini juga tidak dapat diabaikan. Pemilik pangkalan, sebagai bagian dari masyarakat lokal, memiliki kedekatan emosional dengan pelanggannya. Mereka sering meminjamkan tabung secara sukarela kepada pelanggan yang belum mampu membayar atau memberikan layanan ekstra seperti pengantaran gratis. Namun, tindakan-tindakan ini memiliki batas apabila tekanan ekonomi terus berlanjut. Jika tidak diatasi, kondisi ini dapat mengikis semangat pelayanan dan memperburuk iklim usaha di tingkat lokal.

Secara umum, hasil penelitian menggambarkan bahwa kebijakan HET memberikan dampak kompleks dan multidimensi terhadap distribusi LPG di daerah. Kebijakan ini memang berhasil menciptakan stabilitas harga dan manfaat nyata bagi konsumen, tetapi menimbulkan tekanan besar bagi pelaku usaha pangkalan. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh harga yang terjangkau, melainkan juga oleh keberlangsungan usaha di tingkat distribusi dan efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan HET serta penerapan kebijakan penunjang seperti subsidi distribusi dan fleksibilitas harga berbasis wilayah. Tanpa pendekatan menyeluruh, kebijakan yang bertujuan baik ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan baru dalam distribusi energi nasional.

Penerapan HET untuk LPG 3 kg di Pangkalan Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur memberikan manfaat signifikan bagi konsumen, khususnya dalam menciptakan

kepastian harga dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan HET menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dan mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Namun, di balik manfaat tersebut, pemilik pangkalan menghadapi beban operasional tinggi, seperti biaya distribusi, perawatan kendaraan, dan gaji pegawai, yang tidak sebanding dengan margin keuntungan yang menipis akibat harga jual yang ditetapkan.

Masalah distribusi LPG yang tersendat juga memperburuk kondisi pangkalan. Gangguan dari agen akibat infrastruktur buruk, cuaca ekstrem, dan ketidakteraturan pengiriman menyebabkan kekosongan stok. Akibatnya, kepercayaan konsumen menurun dan loyalitas beralih ke pengecer dengan harga lebih tinggi. Pemilik pangkalan menjadi sasaran keluhan, padahal mereka tidak memiliki kendali penuh atas alur distribusi. Hal ini menambah beban sosial dan psikologis bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan HET, melainkan perlu memperkuat dukungan sistemik, seperti subsidi logistik, pelibatan pangkalan dalam penyusunan kebijakan, dan reformasi sistem distribusi agar lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Selain biaya dan distribusi, masalah pengawasan dan literasi publik juga memperkeruh implementasi HET. Sistem pengawasan yang ada bersifat reaktif, hanya aktif saat ada laporan, tanpa mekanisme pengawasan rutin yang efektif. Ini memberi ruang bagi pengecer untuk melanggar aturan harga tanpa takut sanksi, sementara masyarakat sering tidak tahu bagaimana atau ke mana melapor. Lemahnya edukasi tentang hak konsumen dan mekanisme pengaduan menyebabkan pelanggaran terus berulang. Diperlukan inovasi sistem pengaduan berbasis teknologi, seperti aplikasi laporan daring yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan secara anonim dan mendapatkan tindak lanjut real-time. Namun, teknologi ini hanya efektif jika diiringi komitmen penegakan hukum yang konsisten dan transparansi dalam setiap tahap.

Ketimpangan struktural semakin terlihat ketika distribusi LPG lebih berpihak kepada pangkalan besar di pusat kota, sementara pangkalan kecil di desa terpencil menghadapi biaya tambahan tanpa kompensasi. Praktik ini menurunkan daya saing pelaku usaha kecil dan menghambat akses masyarakat desa terhadap energi bersubsidi. Realitas di lapangan menunjukkan penurunan laba bersih hingga 30% per bulan di beberapa pangkalan, meskipun volume penjualan meningkat. Hal ini menandakan kebijakan HET belum memperhitungkan kompleksitas geografis dan ekonomi setiap wilayah. Oleh karena itu, kebijakan turunan seperti subsidi transportasi dan harga diferensial berbasis lokasi perlu diterapkan sebagai upaya korektif.

Distribusi LPG tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dimensi sosial. Pemilik pangkalan sering menjadi bagian komunitas, memberikan bantuan sosial seperti meminjamkan tabung atau layanan antar gratis. Namun, tekanan ekonomi tanpa solusi konkret dapat mengikis semangat sosial ini dan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun HET menciptakan perlindungan bagi konsumen, tanpa pendekatan adaptif dan partisipatif pemerintah, kebijakan ini berisiko menciptakan ketimpangan baru. Untuk keadilan distribusi energi yang berkelanjutan, pemerintah harus rutin mengevaluasi HET dan memastikan suara pelaku distribusi di lapangan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif bisnis Islam, dalam pandangan bisnis Islam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap LPG 3 kilogram dapat dibenarkan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mencegah ketidakadilan pasar. Kebijakan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Namun, pelaksanaan HET di lapangan masih menghadapi kendala, seperti kelangkaan, distribusi tidak merata, dan praktik penimbunan oleh oknum tertentu. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang melarang penimbunan (ihtikar), ketidakpastian yang merugikan (gharar), dan

ketidakadilan ('adl).

Kebijakan HET belum sepenuhnya mampu mewujudkan masalah bagi masyarakat karena lemahnya pengawasan dan pelanggaran etika bisnis. Dalam Islam, baik pemerintah maupun pelaku usaha memegang amanah untuk menjalankan kebijakan secara adil dan bertanggung jawab demi kesejahteraan umat. Kebijakan HET selaras dengan maqashid syariah dalam menjaga kebutuhan dasar (hifzh al-nafs dan hifzh al-mal). LPG 3 kg sebagai sumber energi utama rumah tangga miskin harus terjangkau agar tidak meningkatkan beban hidup masyarakat. Dengan demikian, HET berfungsi sebagai sarana menjamin pemerataan akses energi dan mencegah ketimpangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dijaga pelaksanaannya agar tetap sesuai prinsip bisnis Islam, dengan tanggung jawab kolektif pemerintah, distributor, dan masyarakat dalam menjaga etika distribusi barang publik strategis.

PENUTUP

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan HET memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait bagi distributor LPG dan konsumen. Meskipun kebijakan ini memberikan stabilitas harga yang diinginkan oleh konsumen, tantangan yang dihadapi oleh pemilik pangkalan dalam hal keuntungan dan pasokan perlu diatasi. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan HET mempengaruhi ekosistem distribusi LPG dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, distributor, dan masyarakat untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih baik dan berkelanjutan. Berdasarkan bisnis Islam, kebijakan pemerintah dalam menetapkan HET LPG 3 kg dapat dilihat dan dievaluasi menggunakan prinsip keadilan, larangan riba, dan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nuraisah. "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Dalam Pandangan Fuqaha'." *Mau'izhah* 9, no. 1 (2019): 167.
- Basri, Rusdaya. "Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 KG Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 131.
- Dimas Setiawan. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Bintang Indonesia, 2000.
- F. Najoan, Staydi. "Analysis Strategi Pemasaran Pangkalan Gas LPG 3 KG Pertamina Vera Lumintang Di Desa Poopo Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal EMBA* 11, no. 4 (2023): 626–27.
- Faizal Idris, Reza. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 228.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Gunawan, Wawan. "Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG Tabung 3 Kg Di Kabupaten Tabalong." *JAPB* 3, no. 2 (2020): 709.
- Hajar. "Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET

- Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan.” *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 291–93.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Masyuri, dan Zainudin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Nasution, S. *Meyode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- P. Joko Subagiyo. *Metodelogi Penelitian Dalam Teori Dan Prektek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Puji Lestari, Vita. “Permasalahan Dan Tantangan Transformasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kilogram.” *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI* 1, no. 1 (2022): 3.
- Putri Prameswar, Pradima. “Efisiensi Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas Lpg Pada Masyarakat Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.” *IPDN Kemendagri* 2, no. 3 (2022): 3.
- Soumena, Yasin. “Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah.” *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 46.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Surat Keputusan Gubernur Lampung. “Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg,” September 30, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. {PT} Rajagrafindo Persada, n.d.
- Suryani, Fitri. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Studi Penelitian Di Aceh Barat Daya).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)* 6, no. 2 (2023): 15–17.
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Wahid, Nazaruddin A. *Paradigma Ekonomi Islam*. Banda Aceh: SEARFIQH, 2013.
- Willya, Evra. “Ketentuan Hukum Islam Tentang Ta’sir Al-Jabari.” *Jurnal Ilmiah Syariah* 11, no. 2 (2013).